

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Pada Inspektorat Daerah
Tanjungpinang)**

**Oleh
Basyaruddin Idris
NIM. 2105040142**

ABSTRAK

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis secara geografis dan ekonomi, namun potensinya sering terhambat oleh praktik korupsi di sektor-sektor vital seperti pengadaan barang/jasa, pendidikan, dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan menyoroti peran Inspektorat Daerah dan implementasi sistem e-government. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan langkah-langkah preventif seperti penerapan e-budgeting, e-procurement, dan penguatan fungsi Inspektorat sebagai APIP, praktik korupsi masih terjadi, seperti pada kasus penyalahgunaan dana BOS dan proyek infrastruktur. Kelemahan sistem pengendalian internal dengan melakukan Audit dan Pengawasan Khusus, rendahnya efek jera vonis pidana, dan minimnya partisipasi masyarakat turut memperburuk situasi. Diperlukan pendekatan strategis yang menggabungkan aspek penal dan non-penal, dengan memperkuat integritas kelembagaan, mendorong keterlibatan publik, serta meningkatkan kapasitas Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal. Reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi sejak dini, dan political will dari kepala daerah menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Tanjungpinang.

Kata kunci: Korupsi, Pencegahan, Inspektorat Daerah, E-Government, Tanjungpinang.

***PREVENTION OF CORRUPTION CRIMES WITHIN THE
TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT
(A Study of the Regional Inspectorate of Tanjungpinang)***

**By
Basyaruddin Idris
NIM. 2105040142**

ABSTRACT

Tanjungpinang City, as the capital of Riau Islands Province, holds a strategic geographical and economic position. However, its potential is often hindered by corrupt practices in vital sectors such as goods/services procurement, education, and regional financial management. This study aims to analyze corruption prevention strategies within the Tanjungpinang City Government, focusing on the role of the Regional Inspectorate and the implementation of the e-government system. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and document studies. The findings reveal that despite preventive measures such as the implementation of e-budgeting, e-procurement, and strengthening the Inspectorate's function as the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP), corrupt practices still occur, as seen in cases of misuse of School Operational Assistance (BOS) funds and infrastructure projects. Weaknesses in the internal control system, the low deterrent effect of criminal verdicts, and minimal public participation further exacerbate the situation. A strategic approach combining penal and non-penal aspects is required, emphasizing institutional integrity, encouraging public involvement, and enhancing the capacity of the Regional Inspectorate as the frontline of internal oversight. Bureaucratic reform, early anti-corruption education, and the political will of regional leaders are key to building a clean and accountable government in Tanjungpinang.

Keywords: Corruption, Prevention, Regional Inspectorate, E-Government, Tanjungpinang.